

Makalah: Analisis Penerapan Hukum Wagner (Law of Ever Increasing State Activity) pada Pengeluaran Pemerintah di Indonesia

1. Pendahuluan

Tinjauan mengenai Hukum Wagner, atau Law of Ever Increasing State Activity, mengemukakan bahwa seiring dengan meningkatnya pendapatan suatu bangsa, pengeluaran pemerintah akan meningkat secara lebih dari proporsional. Adolph Wagner, seorang ekonom Jerman abad ke-19, mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita secara alami akan mengarah pada ekspansi fungsi negara dan belanja publik, tidak hanya dalam nilai absolut tetapi juga sebagai bagian atau persentase dari pendapatan nasional (Kónya & Abdullaev, 2018; Kuckuck, 2014). Hukum ini telah menjadi fondasi fundamental dalam disiplin ilmu keuangan publik, yang turut membentuk perdebatan dan diskusi mengenai ukuran dan peran pemerintah, baik di negara-negara maju maupun negara berkembang.

Relevansi teori ini sangat kuat untuk kasus Indonesia. Transformasi ekonomi Indonesia yang pesat, terutama sejak akhir dekade 1990-an khususnya mengemuka pada era dimulainya desentralisasi dan reformasi, memberikan konteks yang sangat menarik untuk menguji Hukum Wagner. Transisi Indonesia dari sistem fiskal yang sentralistik menuju sistem yang terdesentralisasi, yang dipadukan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat serta reformasi kelembagaan yang signifikan, telah mengubah lanskap pengeluaran publik secara drastis. Oleh karena itu, memahami apakah pola pengeluaran pemerintah Indonesia selaras dengan Hukum Wagner menjadi sangat krusial untuk mengevaluasi keberlanjutan fiskal, pemerataan daerah, dan efektivitas desentralisasi di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat (Sugiartiningsih & Saudi, 2019; van der Eng, 2005; Van Eng, 1999).

2. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka fokus masalah dalam makalah ini adalah : "Bagaimana analisis penerapan Hukum Wagner (Law of Ever Increasing State Activity) terhadap tren dan dinamika pengeluaran pemerintah di Indonesia di tengah transformasi ekonomi dan desentralisasi fiskal yang menempatkan Indonesia pada situasi pengeluaran publik relatif meningkat?".

Dalam menjawab fokus masalah tersebut, kami menggunakan referensi yang menjadi rujukan dalam penyusunan makalah ini bersumber pada berbagai literatur baik yang

disediakan di perkuliahan Universitas Terbuka, maupun artikel ilmiah dan buku yang terindeks pada database Scopus.

2. Pembahasan

Berdasarkan referensi yang kami temukan, kasus pemerintah Indonesia secara umum menunjukkan pola yang sejalan dengan Hukum Wagner, di mana kenaikan pendapatan nasional berkorelasi dengan peningkatan pengeluaran publik yang dapat dianalisis melalui poin-poin berikut :

- Kausalitas Searah (Unidirectional Causality): Pengujian empiris menggunakan metode ekonometrika seperti vector autoregression menunjukkan adanya kausalitas searah dari Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap pengeluaran pemerintah di Indonesia (Inchauspe, MacDonald, & Kobir, 2022). Pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan pengeluaran di sektor-sektor krusial seperti infrastruktur, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemberlakuan penganggaran yang bersifat *mandatory spending* baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang juga kemudian di eskalasi dengan semakin meningkatnya jumlah Pemerintah Daerah di era otonomi daerah dan desentralisasi menjadikan kausalitas searah yang berkontribusi pada semakin meningkatnya pengeluaran publik.
- Dampak Desentralisasi Fiskal: Ekspansi aktivitas negara di Indonesia mendapatkan dorongan besar pasca-reformasi tahun 1999 melalui desentralisasi fiskal yang mengalihkan tanggung jawab pengeluaran ke pemerintah daerah (Kis-Katos & Sjahrir, 2017). Desentralisasi ini meluaskan jangkauan pelayanan publik, meskipun di sisi lain memunculkan disparitas kapasitas antar daerah dan membawa tantangan bagi kapasitas fiskal lokal (Brodjonegoro, 2004).
- Perubahan Struktural Era Reformasi: Secara historis, rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan pada era pasca-reformasi, yang diiringi oleh penurunan pangsa konsumsi swasta (Sugartiningih & Saudi, 2019). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas negara secara proporsional mengambil porsi yang semakin besar dalam perekonomian.
- Faktor Penguat Lainnya: Selain murni karena Hukum Wagner, peningkatan pengeluaran negara di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti siklus politik menjelang pemilu di mana pengeluaran meningkat secara signifikan (Setiawan & Rizkiah, 2017). Faktor penguat peningkatan negara tersebut juga diperparah oleh fenomena biaya layanan sektor publik yang semakin mahal tanpa diimbangi produktivitas atau Baumol's cost disease (Colombier, 2017). Terdapat

pula efek krisis (ratchet effect), di mana guncangan membuat pengeluaran negara melonjak dan tertahan di level yang lebih tinggi tanpa kembali ke level awal secara penuh (Gallegati & Tamberi, 2022).

3. Kesimpulan

Tren pengeluaran pemerintah Indonesia secara umum mengonfirmasi berlakunya Hukum Wagner. Terdapat kausalitas yang jelas bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDB di Indonesia menuntut pemerintah untuk terus melakukan ekspansi peran dan memperbesar pengeluaran publiknya (Inchauspe, MacDonald, & Kobir, 2022). Kendati demikian, karakteristik penerapan Hukum Wagner di Indonesia tidak berdiri sendiri; proses ekspansi ini sangat dimoderasi dan dipengaruhi secara kompleks oleh dinamika transisi desentralisasi fiskal, efisiensi birokrasi, siklus politik, dan disparitas antar wilayah.

Referensi :

1. Brodjonegoro, B. (2004). An analysis of Indonesia's transfer system: Recent performance and future prospects. *Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and the Rebuilding of Indonesia*.
2. Colombier, C. (2017). Drivers of health-care expenditure: What role does Baumol's cost disease play?. *Social Science Quarterly*, 98(5), 1603-1621. <https://doi.org/10.1111/ssqu.12384>
3. Gallegati, M., & Tamberi, M. (2022). Long swings in the growth of government expenditure: An international historical perspective. *Public Choice*, 192, 227-248. <https://doi.org/10.1007/s11127-022-00979-1>
4. Inchauspe, J., MacDonald, G., & Kobir, M. A. (2022). Wagner's Law and the dynamics of government spending on Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 58(3), 329-354. <http://hdl.handle.net/10.1080/00074918.2020.1811837>
5. Kis-Katos, K., & Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), 344-365. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2017.03.003>
6. Setiawan, D., & Rizkiah, F. (2017). Political budget cycles in municipalities: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 18(3), 533-540.
7. Sugiartiningsih, & Saudi, N. S. M. (2019). Analysis of economic structural change Indonesia after the reformation ERA. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(7), 808-816.

8. Kónya, L., & Abdullaev, B. (2018). An attempt to restore Wagner's law of increasing state activity. *Empirical Economics*, 55(4), 1569–1583. <https://doi.org/10.1007/s00181-017-1339-x>
9. Kuckuck, J. (2014). Testing Wagner's law at different stages of economic development. *FinanzArchiv*, 70(1), 128–168. <https://doi.org/10.1628/001522114X679183>
10. van der Eng, P. (2005). Indonesia's new national accounts. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(2), 243–252. <https://doi.org/10.1080/00074910500218418>